

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan wisata Guci adalah kawasan yang memiliki pemandian air panas alami yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Banyak pengunjung yang datang untuk menikmati air panas sehingga menciptakan peluang besar bagi penjual makanan khas, kerajinan tangan, dan berbagai produk lokal lainnya sebagai oleh-oleh. Selain itu, terdapat penginapan yang digunakan sebagai tempat menikmati keindahan alam dan suasana pegunungan, ini membuat Guci menjadi tempat yang ideal untuk berkembang bagi pelaku usaha. Selain itu, Guci memiliki banyak potensi yang di antaranya terdapat udara yang sejuk, pemandangan alam yang indah, dan budaya lokal yang menarik sehingga membuat pengunjung betah berlama-lama. Ini membuat Guci menjadi tempat yang sangat menjanjikan untuk mengembangkan usaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas lokal. Peluang lapangan pekerjaan yang berada di wisata Guci dapat menciptakan efek berantai yang signifikan dalam perekonomian lokal karena setiap rupiah yang dibelanjakan wisatawan untuk akomodasi, makanan, transportasi, atau produk kerajinan lokal akan berputar dan menghasilkan pendapatan bagi berbagai pihak, mulai dari pemilik penginapan, pedagang makanan, sopir, hingga pengrajin. Khususnya bagi para pelaku usaha oleh-oleh, yang merupakan salah satu pelaku ekonomi utama di Desa Guci, dampak ini terasa secara langsung dalam kehidupannya.

Sebagai destinasi wisata unggulan, Guci memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tegal.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, pada tahun 2023 objek wisata Guci mampu menyumbang PAD sebesar Rp12,97 miliar (Setda Kabupaten Tegal, 2024). Besarnya kontribusi ini juga disoroti oleh media massa yang menegaskan bahwa wisata Guci merupakan salah satu sektor andalan dalam meningkatkan pendapatan daerah, meskipun masih diperlukan langkah strategis berupa pemerataan zona lokasi dan penataan kawasan agar pengelolaan lebih optimal (Ayo Tegal, 2024). Fakta ini memperlihatkan bahwa keberadaan Guci tidak hanya berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi *instrument* penting dalam memperkuat keuangan daerah. Namun demikian, tingginya sumbangan PAD tersebut seharusnya diikuti dengan adanya perhatian yang lebih serius terhadap pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha lokal agar keberlanjutan pariwisata berjalan beriringan dengan keberlanjutan UMKM.

Wisata di Desa Guci Kabupaten Tegal dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), pengelolaan tersebut mencakup semua kegiatan pariwisata di daerah tersebut termasuk objek wisata Guci yang terkenal dengan pemandian air panasnya. Selain itu, perencanaan dan pengembangan wisata Guci juga dipantau oleh Dinas ini secara sinergis. Disporapar berkonsentrasi pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan meningkatkan layanan yang diberikan kepada pengunjung. Objek Wisata Guci merupakan destinasi tujuan serta memiliki potensi yang tinggi untuk dikunjungi karena wisata ini memiliki keindahan alam yang masih sangat alami, wisata Guci ini tidak hanya dikunjungi oleh masyarakat yang berasal

dari dalam daerah saja tetapi juga menarik perhatian dari luar daerah. Hal tersebut terjadi karena selain memiliki keindahan alam, tetapi Guci juga memiliki fasilitas yang sangat baik seperti hotel-hotel yang ada di dalam kawasan wisata, serta air panas yang berasal dari lereng Gunung Slamet yang menjadi daya tarik utama wisatawan yang berkunjung. Lonjakan pengunjung biasa terjadi pada bulan tertentu, seperti pada libur sekolah atau hari-hari besar seperti libur hari raya, tahun baru, dan hari besar lainnya, berikut merupakan data kunjungan wisatawan yang masuk ke obyek wisata Guci tahun 2023 :

Tabel 1. 1 Data kunjungan wisatawan Guci (jiwa) 2023

Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Total
	81.983	38.400	23.924	85.708	48.900	41.841	320.756
Bulan	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
	58.837	31.962	21.032	46.437	64.385	121.394	344.047
Total							664.803

Sumber : Data BPS Kab.Tegal

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa ketika hari libur atau hari besar maka wisata Guci mengalami lonjakan signifikan dalam jumlah pengunjung, hal ini terjadi karena adanya kebiasaan masyarakat untuk memanfaatkan waktu libur untuk mencari rekreasi dan relaksasi. Seperti pada bulan Desember-Januari yang mengalami peningkatan jumlah pengunjung hingga mencapai 203.377 pengunjung, hal ini terjadi karena musim libur sekolah dan cuti bersama. Di bulan yang lain dapat dilihat pada bulan April yang mendapatkan kunjungan yang sangat jauh angkanya dibandingkan bulan sebelumnya, pada

bulan Maret jumlah kunjungan hanya 23.924 kunjungan dan pada bulan April mencapai angka 85.708 pengunjung, lonjakan ini terjadi karena adanya hari besar seperti hari Raya Idul Fitri.

Wisata unggulan seperti Guci di Kabupaten Tegal seharusnya memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi penduduk setempat. Wisatawan meningkatkan kehidupan warga lokal dan membuka peluang usaha baru. Hal ini ditunjukkan oleh berita bahwa kawasan wisata Guci telah memberikan kesempatan bagi orang-orang, terutama perempuan untuk terlibat dalam usaha seperti menjual makanan, minuman, dan oleh-oleh. Banyak di antara mereka yang sebelumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sekarang mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha di kawasan wisata (PanturaNews, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa wisata Guci memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekonomi lokal. Namun, sulit untuk memanfaatkan potensi ini secara optimal dan berkelanjutan tanpa bantuan dan pembinaan yang sistematis dari pemerintah.

Banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari berjualan di kawasan wisata Guci, hal ini dibuktikan melalui Surat Keputusan Kepala Disporapar tahun 2024 bahwa terdapat 357 pelaku usaha yang berada di kawasan wisata Guci. keterlibatan pelaku usaha dalam sektor perdagangan tidak hanya memberikan sumber pendapatan tambahan bagi keluarga, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Pelaku usaha terdiri dari berbagai jenis usaha, seperti makanan, kerajinan tangan, dan layanan. Semakin banyak wisatawan yang datang maka peluang untuk meningkatkan penjualan juga

semakin terbuka lebar. Dengan demikian, aktivitas berjualan di kawasan wisata Guci menjadi pilar penting bagi kesejahteraan masyarakat setempat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Tercatat terdapat 357 pelaku usaha pada Surat Keputusan kepala Disporapar tahun 2024 yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada kawasan wisata Guci, namun jumlah yang besar tersebut belum diimbangi dengan adanya program pembinaan yang sistematis dari pihak pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada. Kondisi ini menimbulkan permasalahan serius karena tanpa adanya pembinaan yang sistematis, pelaku usaha sulit berkembang secara berkelanjutan dan tidak mampu meningkatkan kualitas produk maupun layanan mereka. Padahal, keberadaan ratusan UMKM ini seharusnya dapat menjadi dorongan bagi Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pariwisata untuk lebih proaktif dalam menggandeng masyarakat melalui program pembinaan dan pendampingan usaha. Tidak adanya upaya pembinaan berpotensi menghambat kesinambungan UMKM, yang pada akhirnya akan mempengaruhi keberlanjutan pariwisata itu sendiri.

Pelaku usaha di kawasan wisata Guci mengambil inisiatif untuk membentuk paguyuban masing-masing usaha sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Paguyuban ini terdiri dari paguyuban umkm kerajinan, umkm manisan, dan umkm jajanan khas Guci. Paguyuban ini berfungsi sebagai sarana komunikasi sekaligus alat untuk menyampaikan aspirasi ketika menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Hal ini tampak pada sikap paguyuban pelaku usaha wisata Guci yang menolak kebijakan

kenaikan harga tiket masuk hingga 58 persen karena dianggap memberatkan masyarakat dan pelaku usaha sendiri (Tribun Jateng, 2024). Selain itu, keberadaan paguyuban juga menjadi saluran bagi pelaku UMKM untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah, sebagaimana tercermin dalam kegiatan reses anggota DPRD Jawa Tengah, dr. Messy Widiastuti, yang secara langsung menyerap aspirasi para pelaku usaha di kawasan wisata Guci (Derap Juang, 2020). Fakta ini memperlihatkan bahwa paguyuban tumbuh sebagai bentuk inisiatif masyarakat dalam mengisi lemahnya peran pemerintah dalam pembinaan UMKM, sekaligus menjadi aktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha di kawasan wisata Guci.

Tidak adanya pembinaan yang resmi dari Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Tegal maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal terhadap pedagang di kawasan wisata Guci menjadi permasalahan yang cukup serius. Pelaku usaha yang jumlahnya ratusan sering kali menghadapi kesulitan dalam menjalankan aktivitas dagangnya, mulai dari penurunan jumlah pembeli, rendahnya daya saing produk, hingga kurangnya strategi pemasaran yang tepat. Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang tidak mampu mengantisipasi dinamika di lapangan, sehingga ketika kunjungan wisata menurun, pendapatan mereka juga ikut merosot. Fakta ini dapat dilihat dari pemberitaan media yang menyoroti keluhan pedagang Guci mengenai sepi pembeli sehingga dagangan yang biasanya habis kini sulit terjual (Tribun Jateng, 30 Oktober 2020). Situasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM di kawasan wisata Guci belum memperoleh perhatian yang optimal dari pemerintah

daerah, padahal pembinaan yang terarah sangat dibutuhkan agar para pelaku usaha mampu bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata daerah.

Pelaku usaha di kawasan wisata Guci pada tahun 2021 juga sangat merasakan tidak adanya pembinaan dan dukungan yang memadai dari pemerintah, hal tersebut terjadi karena kebijakan yang melarang aktivitas masyarakat di kawasan wisata tersebut. Para pelaku usaha UMKM dibiarkan menghadapi masalah mereka sendiri tanpa bantuan atau solusi nyata dari Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Bahkan, karena keterbatasan biaya, beberapa pelaku usaha terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menghentikan pendidikan anak mereka. Fakta ini diberitakan oleh media yang menyoroti kesedihan para pelaku usaha wisata Guci saat ditutupnya kawasan wisata, di mana mereka harus berjuang seorang diri menghadapi dampak pandemi tanpa adanya perhatian dari pemerintah (Gatra, 2021). Situasi tersebut semakin mempertegas bahwa kurang adanya program pembinaan dan pendampingan telah melemahkan daya tahan UMKM, sehingga keberlanjutan usaha mereka terancam ketika menghadapi kritis.

Pembinaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dari pihak yang dibina melalui rangkaian kegiatan manajerial yang terencana dan berkelanjutan, sehingga proses peningkatan kapasitas tidak berhenti pada pelatihan sesaat saja. Pembinaan mencakup upaya pengarahan, pendampingan,

dan pengawasan agar pihak yang dibina mampu mengelola kegiatan secara lebih efektif, mandiri, dan berkesinambungan. Dengan demikian, pembinaan diarahkan untuk membentuk kemampuan jangka panjang yang dapat mendukung keberlanjutan dan peningkatan kinerja secara konsisten.

Penelitian terdahulu menurut Risman et al., (2021) menyatakan bahwa jika potensi wisata suatu daerah meningkat, maka secara langsung juga akan meningkatkan pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut. Hal ini karena industri pariwisata pada dasarnya terdiri dari berbagai usaha yang saling mendukung, mulai dari penyedia oleh-oleh hingga makanan dan minuman bagi wisatawan. Kehadiran wisatawan akan memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan serta terbukanya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pembangunan dan pengembangan sektor wisata juga akan memicu munculnya UMKM baru yang menjadi bagian dari rantai ekonomi pariwisata. Oleh karena itu, strategi pengembangan wisata yang efektif sebaiknya melibatkan upaya untuk memperkuat UMKM dengan dukungan dan pembinaan dari pemerintah maupun pemangku kebijakan agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Berdasarkan data dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pembinaan UMKM di wisata Guci, sebagaimana dijelaskan oleh Roziana et al., (2022) bahwa perlunya pembinaan dari pemerintah kepada UMKM karena UMKM memiliki peran penting dalam upaya pengembangan pariwisata. Penelitian ini penting dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas UMKM

melalui pembinaan kepada pelaku usaha. Meskipun saat ini sudah terdapat paguyuban yang dibentuk melalui inisiatif pelaku usaha itu sendiri tetapi peran pemerintah juga diperlukan agar tidak ada kekosongan peran di masyarakat. Pembinaan dari pemerintah juga akan menjadi salah satu bentuk dukungan dari pemerintah kepada pelaku UMKM untuk bersama-sama menciptakan wisata yang berkelanjutan. Dengan demikian, judul yang diajukan peneliti yaitu **“Analisis Pembinaan UMKM di Kawasan Wisata Guci Tegal”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, ditemukan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Program resmi pembinaan dan pendampingan dari Dinas Koperasi UMKM maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal terhadap pelaku usaha di kawasan wisata Guci belum optimal. (Halaman 5)
2. Fungsi paguyuban UMKM sebagai inisiatif masyarakat untuk mengisi kekosongan pemerintah belum optimal. (Halaman 5)
3. Pelaku usaha mengalami kesulitan menghadapi penurunan pembeli, rendahnya daya saing produk, dan strategi pemasaran yang terbatas. (Halaman 6)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi ilmiah bagi akademisi khususnya ilmu administrasi publik dalam memahami terkait dengan pembinaan umkm di kawasan wisata. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi topik serupa baik di daerah yang sama atau daerah lain yang ada di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat untuk membina ilmu pengetahuan mengenai pembinaan UMKM untuk menjadi referensi dan mampu memberikan bantuan konseptual untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan pembinaan UMKM dari pemerintah kepada pelaku UMKM. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan penulis mengenai pariwisata atau fenomena yang terjadi saat ini.

b. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat menambah kumpulan tinjauan pustaka sebagai bahan bacaan mahasiswa UNDIP tepatnya jurusan administrasi publik mengenai pembinaan UMKM dari pemerintah kepada pelaku usaha.

c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai sumber informasi juga alat untuk evaluasi dalam perbaikan pembinaan UMKM serta memberikan rekomendasi agar lebih meningkatkan prinsip-prinsip yang mendukung pembinaan kepada pelaku UMKM yang berada di kawasan wisata Guci Tegal.

d. Bagi pembaca

Memberikan informasi dan pengetahuan mengenai peran masyarakat dan memperluas peran partisipasi masyarakat dalam pengembangan aktivitas ekonomi di kawasan wisata Guci.

1.6 Kajian Pustaka

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Judul, Tahun, dan Jurnal	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan dengan Penelitian Penulis
1	Enrika Sita Wardani, Adhie Surachman, Nur'aeni “Strategi Komunikasi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”	Teori Pembinaan (Thota, 1989)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah strategi komunikasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) di Kab. Subang dalam membina UMKM mencakup 3 strategi: Strategi penguatan melalui promosi produk, strategi pemberdayaan melalui pelatihan kewirausahaan dan pengembangan saya saing UMKM, dan strategi perlindungan diwujudkan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berfokus pada Kabupaten Subang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Tegal. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.
2	Edi Setiawan, Diana Gustiana Nur'alfiati, Dicka Sunandar Putra	Teori Pembinaan (Musaneff, 2001): 1. Perencanaan 2. Penyusunan	Kualitatif	Hasil penelitian ini diperoleh Kesimpulan bahwa pengembangan UMKM di Kabupaten Sumedang dapat dikatakan cukup baik, namun masih terdapat	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pelaksanaan pembinaanya, pada penelitian ini pemerintah telah melakukan pembinaan tetapi belum optimal, sedangkan

	“Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupate Sumedang”	3. Pembangunan 4. Pengembangan 5. Pengarahan		beberapa kendala seperti pada proses pembinaan dan penataan sumber daya yang disebabkan karena keterbatasan usia yang mempengaruhi kapabilitas SDM	penelitian penulis membahas terkait belum adanya pembinaan Dinas Koperasi UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.
3	Ade Satya Pratama, Yenni Jufri, Yurismen Effendi “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Oleh Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada Oleh-Oleh Sijunjung Kalamai Urang Awak)”	Teori Pembinaan (Prasetyo, 2005): a. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar b. Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal c. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen d. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menjelaskan upaya yang telah dilakukan dinas terkait yaitu melalui memperkuat modal meskipun masih berasal dari pemilik tunggal, peningkatan akses pasar dengan distribusi hingga luar daerah, dan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pelaksanaan pembinaanya, pada penelitian ini pemerintah telah melakukan pembinaan tetapi belum optimal, sedangkan penelitian penulis membahas terkait belum adanya pembinaan Dinas Koperasi UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.

4	Prakoso Adi, Rizka Mulyani, Ardhiana Noor Hanifah Putri, Cindy Intan Putri “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Digital Marketing Pada UMKM Produk Pertanian di Desa Bodag, Madiun, Jawa Timur”	Teori <i>Digital Marketing</i> (Ryan, 2015)	Kualitatif	Hasil penelitian ini terlihat sisi keterampilan menunjukkan hasil positif dengan indikator mempunyai anggota UMKM Desa Bodag dalam membuat foto dan katalog produk makanan, serta konten instagram dan <i>website</i> guna pemasaran produk makanan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pelaksana pembinaan, jika pada penelitian ini pembinaan dilakukan oleh peneliti sendiri sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi penggerak pembinaan UMKM adalah pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.
5	Dava Haviztsa, Adi Mubarak “Peran Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang”	Teori Pembinaan (Gouzali Saydam (2005): - Pengarahan - Konsultasi - Pelatihan keterampilan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Dinas Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya segi sumber daya manusia	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pelaksanaan pembinaanya, pada penelitian ini pemerintah telah melakukan pembinaan tetapi belum optimal, sedangkan penelitian penulis membahas terkait belum adanya pembinaan Dinas Koperasi UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.

6	Fajar Ladung, Rahmawati “Efektivitas Pembinaan UMKM oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare”	Teori Efektivitas menurut Sondang P. Siagian: - Kejelasan tujuan - Kejelasan strategi - Proses analisis dan perumusan kebijakan - Perencanaan - Tersedianya sarana dan prasarana - Pelaksanaan - Sistem pengawasan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan usaha UMKM oleh dinas Tenaga Kerja Kota Parepare melalui pelatihan, sosialisasi akses perizinan, pendampingan kepada pelaku UMKM sudah efektif	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pelaksanaan pembinaanya, pada penelitian ini pemerintah telah melakukan pembinaan tetapi belum optimal, sedangkan penelitian penulis membahas terkait belum adanya pembinaan Dinas Koperasi UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.
7	Aurora Lattita Aulia Ramadhanti, Endang Larasati, Dyah Lituhayu “Strategi Pengembangan	Teori Perencanaan Strategis (Bryson, 2009)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan UMKM dalam mengatasi permasalahan menggunakan metode SWOT: Menyediakan sarana pemasaran produk UMKM	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori perencanaan strategis, sedangkan penulis menggunakan teori pemberdayaan masyarakat.

	UMKM Oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang”			2. Membantu memfasilitasi standarisasi produk UMKM 3. Menyediakan akses UMKM terhadap sumber permodalan 4. Menerapkan digitalisasi pemasaran	Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objeknya yaitu UMKM dan pada fokus penelitiannya yaitu untuk membuat UMKM semakin berkembang.
8	Kadek Novayanti Kusuma Dewi, Luh Putu Mahyuni “Pelatihan <i>Digital Marketing</i> Kepada UMKM di Banjar Pitik Untuk Daya Saing Usaha”	Teori <i>Digital Marketing</i> (Hendriadi, et al., 2019)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah menciptakan pelatihan <i>digital marketing</i> dan memberikan pemahaman serta edukasi akan pentingnya digital marketing di era globalisasi	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada cara pelaksanaannya, penelitian ini yang melakukan pembinaan adalah peneliti itu sendiri, sedangkan penulis pada penelitian tidak turun secara langsung tetapi dengan menganalisis pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah yang kemudian nantinya bisa digunakan sebagai rekomendasi pembinaan dari pemerintah kepada pelaku UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.
9	Efi Deni Piyama, Lora Triana, Rina Sari “Strategi Pengembangan UMKM Produk Lokal di	Teori Strategi Pembangunan (soekatawi, 2001)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dukungan pemerintah akan berperan secara langsung dalam pengembangan UMKM dan penelitian ini merekomendasikan inovasi produk dan dukungan pemerintah dalam mewujudkan strategi yang dihasilkan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pelaksanaan pembinaanya, pada penelitian ini pemerintah telah melakukan pembinaan tetapi belum optimal, sedangkan penelitian penulis membahas terkait belum adanya pembinaan Dinas Koperasi UMKM.

	Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”				Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.
10	Endang Purnama Sari, Dwiyani Sudaryanti, Arista Fauzi Kartika Sari “Analisis Strategi Pengembangan Binis Untuk UMKM Berbasis Teknologi Informasi di Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi”	Teori Strategi Pengembangan (Hariadi, 2003)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha melakukan strategi pengembangan yaitu strategi produk, strategi promosi, strategi penetapan harga, dan strategi tempat dilakukan agar meningkatkan penjualan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitiannya, penelitian ini hanya bertujuan menganalisis strategi pengembangan yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM secara mandiri tanpa membuat rekomendasi pembinaan kepala UMKM oleh pemerintah, sedangkan penulis nantinya akan membuat rekomendasi pembinaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek penelitian yaitu kepada pelaku UMKM dan memiliki fokus yang sama yaitu untuk membuat UMKM lebih berkembang.
11	Ihnida Hanif, Wahju Gunawan, Ivan Darmawan “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	Teori peran pemerintah menurut Soares, A. et al., (dalam Ihnida, 2022): a. Entrepreneur b. Koordinator c. Fasilitator	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 sudah cukup baik karena pemerintah melakukan berbagai upaya untuk membangkitkan UMKM pada masa pandemi mulai dari pelatihan, dukungan modal, hingga fasilitas legalitas usaha	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak peran pemerintah, pada penelitian ini pemerintah telah memberikan pembinaan kepada UMKM, sedangkan pada lokus yang diambil oleh penulis belum memiliki program pembinaan kepada pelaku UMKM.

	dan Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021 di Kota Cimahi (Studi Pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Cimahi)”	d. Stimulator			Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek yang diteliti yaitu pelaku UMKM, selain itu persamaan penelitian terletak pada fokus penelitian yaitu untuk dapat membina UMKM agar lebih berkembang.
12	Natalia Gracia Rimelda Ulut, Paulina Y. Amtiran, Christien C. Foenay “Analisis Pemberdayaan UMKM Terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal di Wilayah Lintas Batas Atambua-Timor Leste”	Teori pemberdayaan (Syarief, 2020)	kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belu sudah cukup baik dalam melakukan pemberdayaan UMKM terlihat bahwa banyaknya pelaku usaha baru yang mendaftar dan adanya peningkatan penghasilan yang di peroleh masyarakat dari hasil ekspor serta peningkatan pengunjung ke daerah perbatasan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berfokus pada wilayah lintas batas Atabua-Timor Leste, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Tegal. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada tujuan penelitian yaitu untuk dapat melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM.

13	Pauzi “Pendekatan Strategis Untuk Pengembangan UMKM Pada Destinasi Wisata”	Teori pengembangan UMKM (Widodo, 2019)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan UMKM di destinasi wisata memerlukan pendekatan strategis yang terintegrasi untuk meningkatkan daya saing, keberlanjutan, dan kontribusi UMKM terhadap perekonomian lokal	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek yang diteliti, penelitian ini membahas pengembangan UMKM di destinasi wisata secara general tanpa ada penjelasan lokus yang lebih spesifik, sedangkan penulis memiliki lokus yang lebih spesifik dalam membahas terkait pengembangan UMKM di wisata Guci Tegal. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada fokus dan tujuan penelitian yaitu untuk mengembangkan UMKM di tempat wisata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
14	Iwan Henri Kusnadi, Luki Natika, Dyera Octa Alsonia “Implementasi Kebijakan Pembinaan UMKM di Kabupaten Subang”	Teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2010)	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam pembinaan UMKM pada instansi terkait sudah efektif pada tipe menfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan Keputusan, pelaksanaan program, sumberdaya yang dilibatkan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berfokus pada Kabupaten Subang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kabupaten Tegal. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah pemerintah setempat belum memiliki Kerjasama manajerial yang memadai pembinaan oleh pemerintah dalam bentuk pelatihan terhadap UMKM.

15	Vanda Ibra Julika, Lulitia Putri Salsabila, Yenti Sumarni “Analisis Pengembangan Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Wisata Pantai Panjang Bengkulu”	Teori pengembangan UMKM (Purnama et al., 2024)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM di Pantai Panjang memiliki potensi besar, terutama di bidang oleh-oleh, kuliner, dan kerajinan tangan	Perbedaan penelitian ini dengan penulis terletak pada proses pengembangannya, pada penelitian ini UMKM telat melakukan pengembangan dengan berbagai langkah seperti pemanfaatan teknologi dan inovasi, sedangkan pada penelitian penulis pelaku UMKM masih memerlukan peran pemerintah untuk berkembang. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada objek yang penelitian yaitu UMKM dan persamaannya terletak juga pada masalah yang dihadapi UMKM yaitu pada permodalan dan minimnya keterampilan UMKM.
----	---	--	-----------------------	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber, 2025

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Setiawan et al., (2024) berjudul “Pembinaan Kelompok UMKM di Kabupaten Sumedang” menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi Pustaka yang dianalisis melalui model Miles dan Huberman. Penelitian ini membahas pelaksanaan pembinaan UMKM oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang serta faktor-faktor penghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan UMKM berjalan cukup baik pada aspek pembangunan, pengembangan, dan pengarahan, namun masih lemah pada aspek perencanaan dan penyusunan terutama terkait pengelolaan keuangan dan perencanaan anggaran. Faktor penghambat berasal dari keterbatasan SDM, minimnya sosialisasi, dan kendala legalitas. Untuk mengatasinya, dinas berupaya melakukan evaluasi rutin, rekrutmen pegawai tambahan, serta fasilitasi pembinaan yang lebih intensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Satya Pratama et al., (2022) dengan judul “Pengembangan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UMKM Kabupaten Sijunjung (Studi Kasus UMKM Kalamai Urang Awak)” menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Penelitian ini membahas strategi pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif oleh dinas terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya upaya peningkatan akses pasar, modal, pelatihan manajemen, serta pemanfaatan teknologi digital, namun masih

terkendala keterbatasan modal, rendahnya inovasi, pengalaman kreatif, dan teknologi produksi yang sederhana.

Dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan, perbedaan utama terletak pada fokus pembinaan dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan ekonomi lokal. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kendala utama dalam pembinaan dan pengembangan UMKM terletak pada sumber daya manusia. Namun, penelitian ini mengamati bagaimana pembinaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan perannya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan atau *research gap* yang perlu dijawab. Sebagaimana besar studi yang telah dilakukan lebih fokus pada evaluasi terkait dengan program yang telah ada atau telah terlaksana tanpa adanya upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan UMKM. Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian terdahulu umumnya mengacu pada teori *digital marketing* dan teori strategi pembangunan secara umum, sedangkan penelitian ini akan menggunakan perspektif pembinaan yang lebih menitikberatkan pada peran pemerintah dalam membina masyarakat untuk meningkatkan keterampilan SDM dan dapat meningkatkan ekonomi lokal.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena program pemerintah melalui pembinaan akan menjadi sangat penting terutama untuk masyarakat yang hidup di kawasan wisata karena akan sangat berguna dalam meningkatkan keterampilan masyarakat dan akan berdampak positif juga pada

kemajuan wisata tersebut. Namun, pembinaan kepada pelaku UMKM masih perlu dikaji lebih dalam. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah daerah dapat memperoleh wawasan lebih jelas mengenai kelebihan dan kekurangan program pembinaan UMKM agar ketika program pembinaan dilaksanakan hasilnya akan lebih optimal.

1.6.2 Landasan Teori

1.6.2.1 Administrasi Publik

Definisi Administrasi menurut Siagian (dalam Keban, 2014) adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Anggara (dalam Keban, 2014) mengartikan administrasi sebagai suatu bentuk pengordinasian sumber-sumber daya yang berkaitan erat dengan tiga fungsi utama, yaitu fungsi pengarahan organisasi berhubungan proses mencapai tujuan dengan perencanaan jangka panjang, fungsi manajemen organisasi, berhubungan dengan usaha mempertahankan organisasi, dan fungsi pengawasan. Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien. Administrasi adalah suatu proses yang umum dalam semua usaha-usaha kelompok baik dalam usaha umum atau pribadi, maupun sipil atau militer dengan secara besar-besaran ataupun kecil-kecilan. Manajemen administrasi atau administrasi adalah pengelolaan data dan informasi yang masuk

organisasi, kemudian seluruh rangkaian kegiatan tersebut meliputi penerimaan, pencatatan, pemilahan, pengolahan, penyimpanan, pengetikan, penyalinan, dan pengiriman informasi dan data tertulis yang diperlukan oleh organisasi.

Menurut Gray (dalam Keban, 2014), yaitu peran Adiminstrasi Publik dalam masyarakat sebagai berikut :

- a. Administrasi Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan.
- b. Administrasi Publik melindungi hak-hak masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat yang melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang keehatan, pendidikan dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.

Administrasi publik dimaknai sebagai organisasi dan manajemennya yang terdiri atas kumpulan individu serta beberapa perlengkapannya untuk mencapai tujuan pemerintah. Administrasi publik berisi kombinasi teori dan praktik dalam mempelajari sebuah penyelenggaraan pemerintah dan/atau lembaga kenegaraan dalam rangka mencapai tujuan pemerintah dan mewujudkan pemenuhan kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Selain itu, administrasi publik berupaya untuk menjelaskan bagaimana pemerintah menyelesaikan permasalahan publik melalui kebijakannya, serta bagaimana suatu kebijakan tersebut dapat terimplementasi secara efektif juga menjadi kajian dalam administrasi publik. Variasi istilah ini lebih populer karena istilah

ini lebih mudah dipahami dan diamati oleh orang awam daripada istilah administrasi publik. Selain itu, perbedaan pengertian ini mungkin berasal dari pengertian "publik" itu sendiri. Meskipun "publik" dapat mengacu pada masyarakat luas sebagai lawan dari individu, "publik" juga dapat mengacu pada mereka yang bekerja untuk kepentingan masyarakat luas atau yang dikenal sebagai "lembaga pemerintah". Sulit memberikan satu definisi administrasi publik yang dapat diterima semua pihak.

1.6.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Perubahan paradigma disiplin ilmu administrasi publik dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi dalam bidang tersebut. Dalam situasi di mana perspektif tertentu menghadapi tantangan dari sumber luar dan mengalami krisis atau *anomalies*, kredibilitas dan kekuatan perspektif tersebut berkurang atau berkurang. Orang-orang mulai mencari perspektif baru, atau paradigma baru. Ketidaksesuaian ini telah terjadi beberapa kali dalam hubungannya dengan kemajuan ilmu administrasi publik, Pergeseran perspektif lama ke perspektif baru adalah buktinya. Fokus membahas apa jenis lahan, metode dasar, atau metodologi ilmiah yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu persoalan, sedangkan lokus membahas di mana lahan, medan, atau tempat metode tersebut digunakan. Berdasarkan dua kategori disiplin tersebut, Henry menemukan lima paradigma dalam administrasi negara, yang akan diuraikan di bawah ini:

1. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Frank J. Goodnow dan Leonard D. White adalah tokoh-tokoh yang mendukung paradigma tersebut. Dalam tulisannya tahun 1990, "Politik dan Administrasi", Goodnow menyatakan bahwa politik harus fokus pada kebijakan atau ekspresi kehendak rakyat, sedangkan administrasi harus fokus pada pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan atau kehendak tersebut. Di antara politik dan administrasi, ada perbedaan antara badan legislatif dan eksekutif. Badan legislatif bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kehendak rakyat, dan badan eksekutif bertanggung jawab untuk menerapkan kehendak tersebut. Dalam kasus ini, badan judikatif membantu badan legislatif menentukan tujuan dan membuat kebijakan. Paradigma ini mengatakan bahwa administrasi harus dilihat sebagai suatu entitas yang memiliki nilai sendiri dan bekerja untuk mencapai nilai ekonomi dan efisiensi birokrasi pemerintah. Sayangnya, dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek "lokus" saja, yaitu *government bureaucracy*. Tetapi fokus atau metode apa saja yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Willoughby, Gullick, dan Urwick adalah contoh terkenal dari paradigma ini, dan mereka juga sangat dipengaruhi oleh figur manajemen klasik seperti Fayol dan Taylor. Prinsip-prinsip administrasi menjadi fokus mereka dalam administrasi publik. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsip yang disebut sebagai POSDORB (*Planning, Organization, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting*) dapat diterapkan di mana saja dan

kapan saja. Namun, lokus administrasi publik tidak pernah dijelaskan secara eksplisit karena mereka percaya bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan di mana saja, termasuk di organisasi pemerintah. Di bawah paradigma ini, fokus lebih penting daripada lokus.

3. Paradigma administrasi Negara Sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Saat ini, administrasi publik dapat dianggap sebagai bidang ilmu politik. Banyak teori dan konsep dari ilmu politik dimasukkan ke dalam studi administrasi publik, yang membuat analisis lebih mudah. Namun, karena hubungannya dengan ilmu politik, administrasi publik dianggap sebagai bidang keilmuan yang terpisah.

4. Paradigma Administrasi publik Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya dikembangkan secara ilmiah dan mendalam dalam paradigma ini. Paradigma ini berfokus pada perilaku organisasi, analisis, manajemen, dan penerapan teknologi kontemporer seperti metode kuantitatif, analisis sistem, dan riset operasi. Paradigma ini memiliki dua arah pertumbuhan. Yang pertama mengarah ke ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi sosial, dan yang kedua mengarah ke kebijakan publik. Sepertinya semua fokus yang dibahas di sini dapat diterapkan baik di bidang bisnis maupun administrasi publik. Jadi, lokusnya tidak jelas.

5. Paradigma Administrasi Sebagai Administrasi Publik (1970-an)

Dalam paradigma ini, ada fokus dan lokus yang jelas. Fokusnya adalah teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik, dan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik.

6. Paradigma Administrasi Publik Sebagai *Governance* (1990-sekarang)

Administrasi publik mengalami perubahan besar sebagai alat untuk tata kelola pemerintah yang baik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, paradigma ini menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Selain itu, negara tidak lagi memegang kekuasaan, tetapi sekarang berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil secara strategis. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam penelitian Analisis Pembinaan UMKM di Kawasan Wisata Guci Tegal termasuk ke dalam paradigma *governance* karena fokus utamanya adalah pada bagaimana proses pembinaan pelaku UMKM dilakukan melalui hubungan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lain di kawasan wisata, guna menciptakan pelaku UMKM yang kompeten dan dapat menjadi penggerak peningkatan ekonomi lokal serta memperkuat peran pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Paradigma ini menekankan bahwa tata kelola tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai aktor untuk meningkatkan kualitas layanan termasuk di destinasi wisata Guci. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan pembinaan UMKM di Guci sangat bergantung pada tata kelola yang melibatkan Dinas Koperasi UMKM,

Disporapar, pelaku UMKM, masyarakat lokal, serta pihak swasta dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, dan mengawasi keberlanjutan usaha. Paradigma *governance* juga relevan karena penelitian ini menelaah bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antar pihak mendukung pemberdayaan UMKM di kawasan wisata yang merupakan inti dari tata kelola publik yang baik.

1.6.2.3 Manajemen Publik

Manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemantauan upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Di dalam pengertian umum, manajemen didefinisikan sebagai seni dan ilmu yang dilakukan dengan cara ilmiah, logis, dan sistematis dalam rangka pencapaian tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien agar mampu berguna bagi pihak-pihak yang memangku kepentingan terkait. Administrasi publik berkaitan dengan manajemen karena menjadi salah satu bagian dari 3 ruang lingkup utama administrasi publik yang dinamakan dengan manajemen publik, kebijakan publik dan implementasi.

Manajemen diperlukan dalam organisasi publik karena dapat mendorong pencapaian tujuan menjadi lebih efektif dan efisien, mengharmonisasikan tujuan-tujuan yang diharapkan sebelumnya, mengembangkan daya saing agar dapat menghadapi tuntutan dan persaingan, menjaga kedamaian dan keharmonisan anggota dalam organisasi supaya terhindar dari adanya konflik yang dapat merugikan organisasi (Nugroho,

Dian, 2017 : 10). Terdapat lima fungsi manajemen menurut Henry Fayol (dalam Hariani, 2013 : 16 – 18) yang saling berhubungan satu sama lain dalam membentuk kesatuan yang menjadi kekuatan dimulai dari proses *planning*, *organizing*, *commading*, *coordinating*, *controlling* yang fungsinya saling terkait tidak dapat dipisahkan demi terciptanya tujuan dari organisasi melalui kegiatan manajemen. Fungsi *planning*, *commading*, *controlling* dalam manajemen menjadi fokus utama yang digunakan dalam penelitian ini.

Manajemen publik dilihat berdasarkan pengertian diatas dapat didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan yang menerapkan metode atau cara-cara tertentu dalam organisasi publik, tujuannya agar tercipta kinerja yang efektifitas dan efisiensi untuk mewujudkan tujuan dari organisasi publik yang dilakukan dengan metode kebersamaan dan membutuhkan peran dari pihak-pihak terkait demi memenuhi kepuasan pencapaian tujuan dari publik atau masyarakat dengan cara menyediakan pelayanan yang prima sesuai penerapan dari fungsi-fungsi manajemen.

1.6.2.4 Teori Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Pembinaan” berasal dari kata “bina” yang artinya sama dengan “bangun”. Pembinaan dapat dipahami sebagai suatu proses, cara, ata upaya dalam membina dan menyempurnakan sekelompok orang guna mencapai perubahan kearah yang lebih baik. Dengan demikian, pembinaan dapat diartikan sebagai suatu upaya pembaharuan untuk menyesuaikan sesuatu agar sesuai denga kebutuhan, lebih

bermanfaat, serta mampu menghasilkan keberhasilan dan daya guna dalam rangka membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembinaan merupakan sebuah usaha yang dilaksanakan secara sadar, terencana, teratur, serta terarah dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan individu atau kelompok yang menjadi subjek binaan. Proses ini tidak hanya mencakup pemberian pengarahan dan bimbingan, tetapi juga melibatkan pengawasan serta berbagai bentuk aktivitas yang mendukung tercapainya perkembangan yang diharapkan. Di dalamnya terdapat stimulasi, dorongan, dan pengendalian agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai tujuan. Dengan demikian, pembinaan dapat dipahami sebagai rangkaian usaha yang menyeluruh dalam membentuk, mengarahkan, serta memperkuat potensi manusia agar mampu berkembang dan berdaya guna sesuai harapan yang telah ditetapkan.

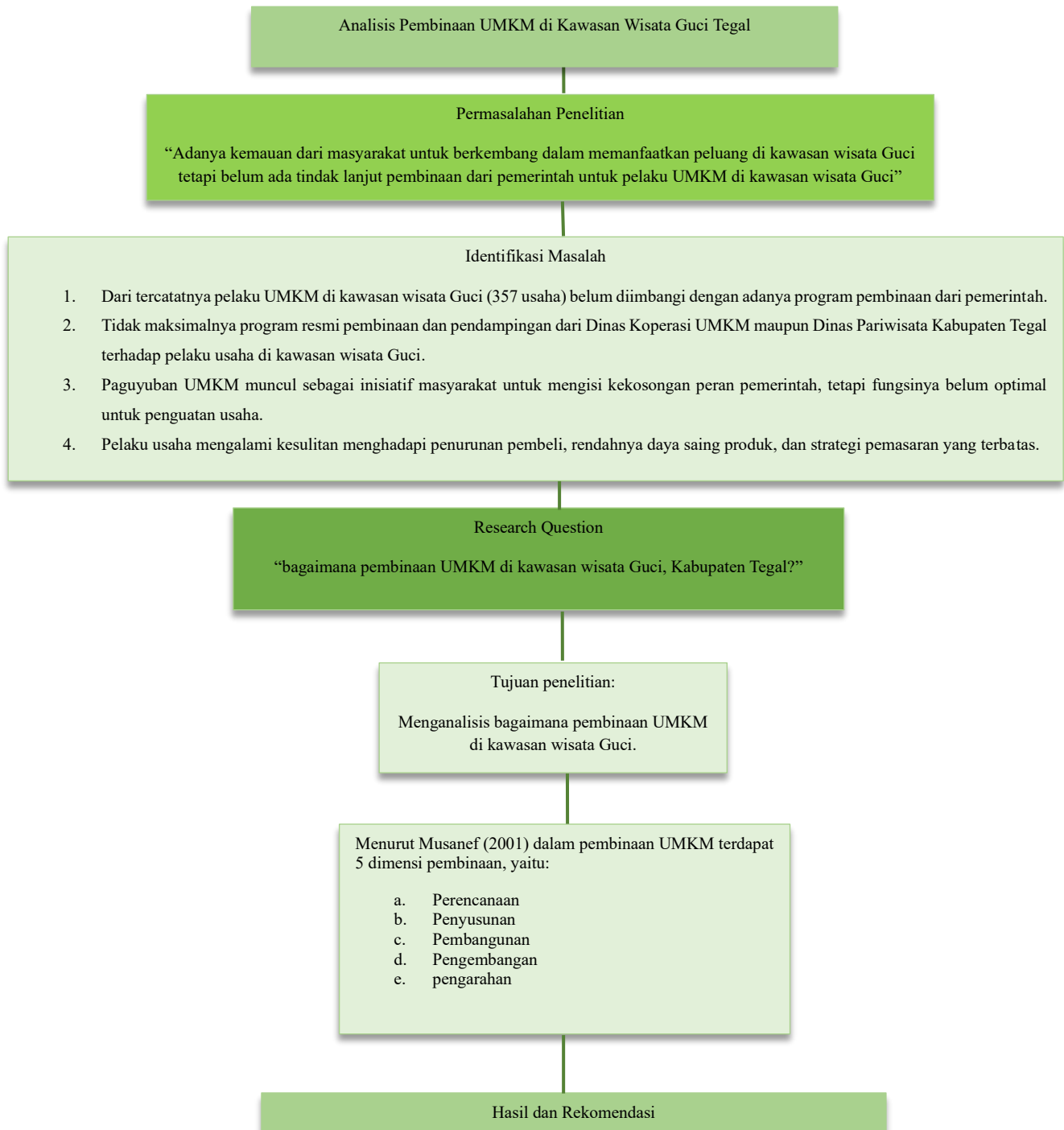
Pelaku UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembinaan, karena tanpa adanya partisipasi mereka, kegiatan pembinaan tidak dapat terlaksana. Dalam hal ini, pelaku UMKM menjadi objek sekaligus peserta yang mendapatkan pembinaan dari dinas koperasi, UMKM, dan perdagangan. Kegiatan pembinaan sendiri mencerminkan tingkat profesionalisme suatu instansi dalam menjalankan tugasnya, sekaligus menggambarkan proses yang terstruktur untuk mencapai hasil yang optimal. Sejalan dengan pendapat Widjaja (2017), pembinaan dipahami sebagai suatu proses pengembangan yang meliputi tahapan-tahapan mulai dari mendirikan,

memelihara pertumbuhan, hingga melakukan perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan.

Menurut Musanef (2001) dalam Edi Setiawan, terdapat 5 dimensi dalam pembinaan UMKM, yaitu:

1. Perencanaan, yang menentukan kebutuhan, tujuan, serta arah pembinaan secara jelas dan terukur agar program yang disusun benar-benar sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM.
2. Penyusunan, yang menyiapkan tim pengelola, pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berjalan terstruktur dan efektif.
3. Pembangunan, yang mencakup pengembangan kemampuan, keterampilan, dan potensi pelaku UMKM melalui berbagai bentuk pelatihan atau pendampingan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menjalankan usaha.
4. Pengembangan, yang melakukan peningkatan kualitas secara berkelanjutan dengan menyesuaikan program pembinaan terhadap kebutuhan UMKM dan perubahan kondisi lapangan agar proses pembinaan tetap relevan dan optimal.
5. Pengarahan, yang memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan yang diperlukan agar pelaku UMKM dapat mengikuti pembinaan dengan baik serta menjalankan hasil pembinaan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

1.7 Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: dibuat oleh peneliti 2025

1.8 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep adalah proses menjabarkan konsep abstrak menjadi lebih spesifik agar dapat dianalisis dalam penelitian. Fokus lebih pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, makna, dan konteks yang tidak selalu dapat diukur. Peneliti dapat memastikan bahwa ide-ide yang diteliti dapat analisis secara ilmiah dan mendalam dengan menggunakan konsep yang tepat.

1. Pembinaan

Teori pembinaan pada dasarnya menekankan pada proses terencana untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap individu atau kelompok agar dapat berkembang sesuai tujuan yang diharapkan. Pembinaan dipandang sebagai upaya sistematis melalui pembimbingan, pelatihan, arahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang atau lembaga terkait. Teori ini menekankan bahwa pembinaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga mencakup penguatan mental, sikap, serta penyesuaian terhadap aturan dan nilai yang berlaku, sehingga tercipta kemandirian, profesionalisme dan hasil yang optimal. Menurut Musanef (2001) dalam pembinaan UMKM terdapat 5 dimensi dalam pembinaan, yaitu:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah proses merancang dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil pembinaan secara optimal yang mencakup penentuan tujuan, sasaran, strategi, program, serta sumber

daya yang diperlukan agar kegiatan pembinaan dapat terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan pihak yang dibina. Dimensi perencanaan berfungsi sebagai landasan awal untuk memastikan kegiatan pembinaan UMKM berjalan terarah, efektif, dan sesuai kebutuhan. Melalui perencanaan, Dinas Koperasi dan UMKM dapat memetakan masalah, merancang program yang tepat dan mengalokasikan sumber daya secara optimal sehingga proses pembinaan dapat bersifat merata guna mendukung perkembangan UMKM.

b. Penyusunan

Penyusunan adalah tahapan yang berkaitan dengan pengaturan dan pengorganisasian seluruh rencana, program, serta komponen pembinaan agar tersusun secara sistematis dan terkoordinasi. Dimensi ini menekankan pada bagaimana rancangan pembinaan disusun menjadi pedoman yang jelas dan terstruktur sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. Dimensi penyusunan berfungsi untuk merumuskan program atau kegiatan secara lebih terstruktur berdasarkan hasil perencanaan yang telah dibuat. Dengan adanya penyusunan yang jelas, proses pembinaan dapat berjalan terarah, terukur, dan mudah di evaluasi, sehingga tujuan peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM dapat tercapai secara efektif.

c. Pembangunan

Pembangunan adalah aspek yang menekankan pada upaya membentuk, memperkuat, dan menata elemen-elemen yang diperlukan agar proses

pembinaan dapat berlangsung secara terarah dan berkelanjutan. Dimensi pembangunan berfungsi sebagai tahap implementasi nyata dari program yang telah direncanakan dan disusun, dengan fokus pada pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas UMKM. Melalui dimensi ini, pembinaan tidak hanya sebatas teori atau rencana, tetapi diwujudkan dalam Tindakan konkret yang mendorong UMKM menjadi lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing.

d. Pengembangan

Pengembangan adalah aspek yang berfokus pada peningkatan kualitas, kapasitas, dan potensi dari pihak yang dibina maupun sistem pembinaan itu sendiri agar mampu mencapai kondisi yang lebih baik. Dimensi pengembangan berfungsi untuk memperluas, meningkatkan, dan memperdalam hasil dari proses pembinaan agar UMKM dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Dengan adanya pengembangan, pembinaan tidak berhenti pada peningkatan dasar saja, tetapi diarahkan pada penciptaan UMKM yang lebih mandiri, adaptif terhadap perubahan, dan mampu bersaing di tingkat lokal maupun lebih luas.

e. Pengarahan

Pengarahan adalah aspek yang menitikberatkan pada proses memberikan petunjuk, arahan, atau bimbingan agar pelaksanaan pembinaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dimensi pengarahan berfungsi untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi agar pelaku UMKM mampu melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengarahan, proses pembinaan menjadi lebih terkontrol, terfokus, dan mampu mendorong UMKM bergerak pada jalur yang benar untuk mencapai kemandirian dan peningkatan daya saing.

1.9 Fenomena Penelitian

Fenomena penelitian ini merujuk pada kejadian, peristiwa, atau kondisi yang menjadi fokus utama dalam studi. Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang akan diteliti yaitu kekosongan peran pemerintah dalam memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM yang ada di kawasan wisata Guci. Fenomena ini mencerminkan tantangan tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam proses pengelolaan UMKM di kawasan wisata Guci. Dengan menganalisis fenomena ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam untuk mengenal dinamika pengelolaan UMKM yang berdampingan dengan pengelolaan wisata yang terus berkembang serta merekomendasikan Langkah-langkah untuk meningkatkan pembinaan bagi para pelaku usaha di kawasan wisata Guci.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengenali secara mendalam dinamika sosial, persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat. Metode kualitatif memungkinkan analisis terhadap pembinaan UMKM yang tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif, seperti tingkat kepercayaan pelaku usaha terhadap pembinaan UMKM atau kebutuhan pembinaan seperti apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh pelaku usaha.

1.10.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana implementasi pembinaan terlaksana dan sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha yang ada di kawasan wisata Guci.

1.10.3 Lokus penelitian

Lokus yang dijadikan situs penelitian di sini adalah kawasan wisata Guci, Kabupaten Tegal dan lebih fokusnya lagi kepada pelaku usaha di kawasan wisata Guci. Pemilihan lokus ini tidak semata ditetapkan tetapi karena adanya asumsi terkait dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini dan kemudian dibuktikan dengan data-data yang nantinya akan dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini

mengeksplorasi bagaimana pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UMKM dan Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal.

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan secara langsung dari masyarakat sebagai pelaku usaha yang ada di kawasan wisata Guci, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pariwisata. Wawancara mendalam dengan pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan data terkait dengan pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci dari sudut pandang pelaku usaha, sedangkan wawancara mendalam kepada Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Pariwisata bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih luas dari sudut pandang pelaksana pembinaan agar informasi yang di dapat lebih konkret. Selain itu, tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pengelolaan dan pembinaa UMKM di kawasan wisata Guci, serta apa yang diperlukan untuk membantu para pelaku usaha meningkatkan pendapatannya.

Penelitian ini juga akan menggunakan metode observasi untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan terkait dengan pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci. Melalui observasi, peneliti dapat mengamati secara nyata bagaimana pelaksanaan kegiatan

pembinaan dilakukan serta sejauh mana peran Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan dalam menjalankan fungsi pembinaannya terhadap pelaku UMKM. Metode ini digunakan untuk melihat kesesuaian antara peran yang seharusnya dijalankan oleh dinas dengan praktik yang terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran objektif mengenai pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci.

2. Data sekunder

Untuk meningkatkan analisis, penelitian ini menggunakan data sekunder yang kaya dan beragam. Data sekunder akan berasal dari publikasi jurnal oleh peneliti sebelumnya yang telah menyelidiki hubungan antara pariwisata, dampaknya terhadap ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Studi ini akan menyediakan kerangka teoritis dan bukti empiris yang relevan dengan konteks penelitian Desa Guci. Selain itu, data sekunder juga akan dikumpulkan dari instansi yang terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyediakan dan mempublikasi data statistik tentang jumlah wisatawan Guci dan perkembangan pariwisata. Selain itu ada Dinas Pariwisata setempat yang memiliki data tentang potensi dan kemajuan pariwisata di wilayah Guci. Media massa juga akan berfungsi sebagai sumber data sekunder yang berguna untuk memberikan informasi terbaru tentang tren pariwisata, kebijakan pemerintah, dan peristiwa yang relevan dengan penelitian ini.

1.10.5 Pemilihan Informan

Peneliti menggunakan metode *purposive sampling* untuk menemukan informan dalam penelitian ini. *Purposive sampling* adalah metode pengambilan sampel dari sumber data dengan pertimbangan khusus. Pertimbangan tertentu ini, misalnya, dianggap memiliki pengetahuan paling luas tentang apa yang diharapkan dari peneliti atau memiliki posisi penting yang memudahkan peneliti untuk mempelajari situasi sosial atau objek yang diteliti.

Pilihan informan didasarkan pada fakta bahwa informan dianggap memiliki pengetahuan paling luas tentang pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci. Informan pendukung yang digunakan untuk melengkapi data penelitian:

- a. Kepala Kepala UPT Objek Wisata Guci
- b. Bidang UMKM Kabupaten Tegal
- c. Pelaku usaha

Selain itu, subjek penelitian disebut sebagai informan, informan merujuk pada individu yang dapat dipercaya yang dapat memberikan informasi yang akurat untuk melengkapi data penelitian. Pada awalnya, jumlah sumber data hanya sedikit, tetapi kemudian menjadi lebih banyak. Ini dilakukan karena data dari sumber awal tidak memenuhi kebutuhan sehingga peneliti mencari informasi tambahan dari informan sebelumnya.

1.10.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (interview guide) yang disusun secara terstruktur untuk

memperoleh informasi mendalam dari para informan yang berperan langsung dalam proses pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci. Pedoman wawancara ini ditujukan kepada Kepala UPTD Objek Wisata Guci, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tegal, serta pelaku usaha yang berada di kawasan wisata Guci. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi terkait peran masing-masing pihak dalam proses pembinaan, bentuk kegiatan pembinaan yang dilakukan, serta kendala yang dihadapi dalam upaya pengembangan UMKM di kawasan tersebut.

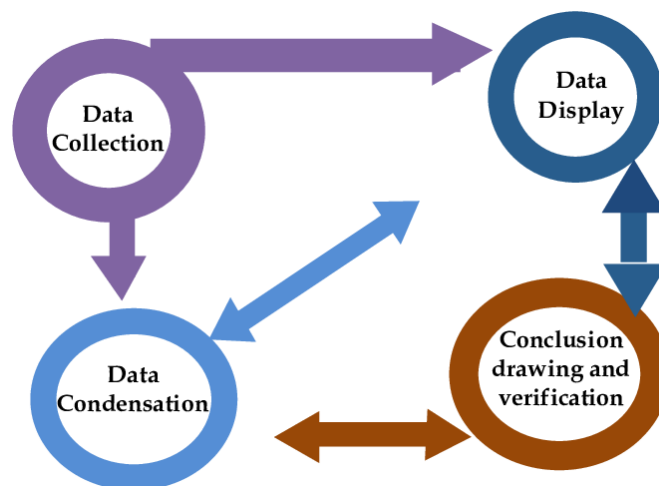
Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan metode observasi untuk memperoleh data yang bersifat faktual dan objektif mengenai kondisi di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku UMKM di kawasan wisata Guci, termasuk keterlibatan pihak dinas dan pengelola wisata dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat. Dengan kombinasi antara wawancara dan observasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana pembinaan UMKM dilaksanakan serta sejauh mana peran dinas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

1.10.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi *studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi*. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teori serta memperkuat kerangka konseptual penelitian. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan terkait

pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti Kepala UPTD Objek Wisata Guci, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM, serta pelaku usaha di kawasan wisata Guci, guna memperoleh informasi mendalam. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa arsip, laporan, foto, dan dokumen resmi yang mendukung hasil observasi dan wawancara.

1.10.8 Teknik Analisis Data



Gambar 1.1 Teknik Analisis Data Miles

Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses penyederhanaan, pemilahan, dan pengelompokan data berdasarkan *keyword* yang telah ditentukan dari hasil operasionalisasi konsep penelitian, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih fokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, hasil kondensasi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk

memudahkan pemahaman terhadap temuan di lapangan. Tahap terakhir yaitu verifikasi data atau penarikan kesimpulan, di mana peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menarik kesimpulan yang valid dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Atlas.ti, yaitu salah satu program *Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS) yang dikembangkan oleh Thomas Muhr sejak 1993 di Technical University of Berlin. Atlas.ti berfungsi mendukung proses analisis kualitatif dengan mempermudah penataan data, pemberian kode, pengelompokan kategori, hingga identifikasi tema dari berbagai sumber seperti teks, wawancara, observasi, dan dokumentasi (Frieze, 2019).

1.10.9 Kualitas Data

Untuk menguji kualitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Dalam hal ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan yang sama kepada tiga aktor utama, yaitu Kepala UPTD Objek Wisata Guci, Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM, serta pelaku usaha di kawasan wisata Guci. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi jawaban yang diberikan oleh ketiga pihak tersebut terkait pembinaan UMKM di kawasan wisata Guci. Apabila ketiga jawaban menunjukkan kesamaan atau konsistensi, maka data tersebut dapat dianggap valid dan mewakili kondisi sebenarnya di lapangan. Namun, jika ditemukan adanya perbedaan atau ketidakkonsistenan dalam jawaban, peneliti akan

mencari penyebabnya. Dengan cara ini, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keakuratan dan keandalan yang tinggi.